

ABSTRAK

Alih fungsi terjadi di Desa Dakiring Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, tanah hibah yang diberikan oleh Alm. E kepada keluarganya untuk dijadikan makam pribadi (Makam Keluarga Besar). Seiring dengan berjalannya waktu cucu dari H yang bernama NA dan merupakan anak dari NH membuat suatu tempat tinggal pribadi di tanah hibah yang seharusnya dijadikan makam tersebut. Issu hukum terkait dengan pelaksanaan alih fungsi tanah hibah yang diperuntukkan makam, dijadikan sebagai tempat tinggal pribadi serta kesesuaian alih fungsi tanah hibah dari makam menjadi sebuah tempat tinggal pribadi bertentangan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian empris dengan memakai pendekatan fakta (*Fact Approach*), yang mana pendekatan fakta tersebut melihat fakta yang ada di masyarakat serta kemudian dikaitkan dengan Peraturan Perundang-undangan. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, pelaksanaan alih fungsi yang diperuntukkan makam dijadikan sebagai tempat tinggal pribadi yang dilakukan oleh cicit dari Alm. E yaitu saudari NA terjadi sejak tahun 2017. Alih fungsi yang dimaksud ialah perubahan pada fungsi makam, yang seharusnya dijadikan makam keluarga namun dibangun tempat tinggal pribadi di atasnya, sehingga apabila keluarga Alm. E meninggal dunia maka proses pemakamannya dilakukan di tanah milik orang lain. Pelaksanaan alih fungsi tersebut tidak sesuai dengan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Kata Kunci : Alih Fungsi, Tanah Hibah, Pendaftaran Tanah

ABSTRAC

Diversion of function took place in Dakiring Village, Socah District, Bangkalan Regency, the land was granted by the late. E his family to be used as a private grave (Tomb of the Great Family). Over time, the grandson of H, named NA and the son of NH, made a private residence on the land that was supposed to be the tomb. Legal issues related to the implementation of the transfer of function of land grants where the discovery of the grant is used as a private residence as well as an alternative to the transfer of the function of land where the tomb resides in a first agreement is contrary to Law Number 5 of 1960 Basic Regulations on Agrarian Principles and Government Regulation Number 24 1997.

This research uses an empirical research method using a fact approach, in which the fact approach looks at the facts that exist in the community and then follows the laws and regulations. Methods of data analysis using descriptive qualitative method.

The results of the research based on what was done, the implementation of the transfer of functions where the tomb was used as a private residence carried out by the great-grandson of the late. E, the sister of NA, has occurred since 2017. The transfer of function in question is a change in the function of the tomb, which should be used as a family tomb but builds a private residence, so that if the family of the late Alm. E died, so the funeral process was carried out on someone else's land. The implementation of the transfer of functions is not in accordance with Article 19 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles and Article 3 of Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration.

Keywords : Diversion of Function, Grant Land, Land Registration